

SOAL PERPAJAKAN

1. Iuran atau pungutan yang wajib dibayarkan kepada negara berdasarkan Undang-Undang dan tanpa ada balas jasa secara langsung disebut ...
 - a. Pajak
 - b. Pendapatan
 - c. Retribusi
 - d. Materai
2. Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan dimulai sejak ...
 - a. Wajib Pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - b. Wajib Pajak terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak
 - c. Wajib Pajak memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
 - d. Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
3. Berikut ini yang termasuk Pajak Pusat yaitu ...
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Restoran
 - d. Bea Materai
4. Berikut ini termasuk pajak daerah, kecuali ...
 - a. Pajak Restoran
 - b. Pajak Hiburan
 - c. Pajak Perhotelan
 - d. Pajak Penghasilan
5. Sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak taat membayar pajak adalah ...
 - a. Wajib lapor kepada polisi
 - b. Membayar denda
 - c. Diberi teguran
 - d. Penyitaan barang
6. Tarif pajak merupakan ketentuan ...
 - a. Besarnya pajak yang harus dibayar

- b. Biaya penarikan pajak yang harus dibayar
 - c. Nilai barang yang kena pajak
 - d. Besarnya pajak yang sudah dibayar
7. Berikut ini pemotong Pajak PPh pasal 21 atau PPh pasal 26, kecuali ...
- a. Bendaharawan pemerintah
 - b. Dana pensiun
 - c. Badan penyelenggaran jaminan social tenaga kerja
 - d. Pejabat perwakilan diplomatic
8. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah ...
- a. Asuransi kecelakaan
 - b. Zakat yang diterima
 - c. Gaji
 - d. Penerimaan dalam bentuk natura
9. Berikut ini bukan termasuk penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan ...
- a. Penghasilan dari pekerjaan bebas
 - b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
 - c. Penghasilan dari hadiah undian
 - d. Penghasilan dari bantuan atau sumbangan dan harta hibahan
10. Dika adalah PNS dengan status kawin dengan 1 anak, maka PTKP yang bisa dikurangkan terhadap penghasilan Dika adalah ...
- a. Rp54.000.000,-
 - b. Rp58.500.000,-
 - c. Rp63.000.000,-
 - d. Rp67.500.000,-
11. Toni bekerja pada PT Nusantara dengan memperoleh gaji sebulan Rp 5.500.000, dengan biaya jabatan 5% dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000/bulan. Toni sudah menikah dan belum memiliki anak. Berapakah pajak PPh 21 yang harus dibayarkan oleh Toni pertahunnya ?
- a. Rp180.000,-
 - b. Rp1.800.000,-
 - c. Rp3.600.000,-

- d. Rp540.000,-
12. Berdasarkan informasi soal no 11, berapa jumlah PPh 21 yang harus dibayar tiap bulan ?
- a. Rp18.000,-
 - b. Rp32.000,-
 - c. Rp15.000,-
 - d. Rp45.000,-
13. Penghasilan Kena Pajak Pak Toni sebesar Rp75.000.000,- . Berapakah Pajak Penghasilan yang harus dipotong Pak Toni ?
- a. Rp3.750.000,-
 - b. Rp6.250.000,-
 - c. Rp2.500.000,-
 - d. Rp7.500.000,-
14. Berdasarkan soal no 11 jika Pak Toni tidak memiliki NPWP maka besarnya pajak penghasilan yang harus dipotong adalah ...
- a. Rp3.750.000,-
 - b. Rp6.250.000,-
 - c. Rp2.500.000,-
 - d. Rp7.500.000,-
15. Apabila Penghasilan Tahunan >Rp50 Juta s/d Rp250 Juta. Maka tarif pajak yang dikenakan sebesar ...
- a. 5%
 - b. 15%
 - c. 30%
 - d. 25%
16. Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah ...
- a. Jalan tol
 - b. Masjid
 - c. Kolam renang
 - d. Pagar mewah

17. Tuan Ahmad membeli sebidang tanah seluas 200 m² dengan harga perolehan Rp 200.000.000, dengan tarif regional untuk NPOPTKP Rp 50.000.000. Atas pembelian tersebut, berapa BPHTB yang harus dibayar Tuan Ahmad ?
- Rp 5.000.000
 - Rp 7.500.000
 - Rp 8.000.000
 - Rp 6.000.000
18. Pak Rudi memiliki rumah seluas 50 m² yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 100 m². Diketahui harga bangunan tersebut adalah Rp500.000,-/m sedangkan harga tanah tersebut adalah Rp 1.000.000,- /m. Berapakah PBB yang harus dibayarkan oleh Pak Rudi ?
- Rp125.000,-
 - Rp150.000,-
 - Rp130.000,-
 - Rp120.000,-
19. Tarif pajak bumi dan bangunan yang dikenakan atas objek pajak adalah ...
- 0,1 %
 - 0,5 %
 - 20 %
 - 40 %
20. Besarnya persentase jika NJKP < 1 Milyar adalah sebesar ...
- 20 %
 - 40 %
 - 30 %
 - 25 %
21. Besarnya persentase jika NJKP < 1 Milyar adalah sebesar ...
- 20 %
 - 40 %
 - 30 %
 - 25 %

22. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan ...
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1994
 - Undang –Undang No 12 Tahun 1989
 - Undang –Undang No 12 Tahun 1993
 - Undang –Undang No 12 Tahun 1990
23. Tuan Maburur memiliki rumah di Jakarta dengan NJOP Bumi 500 m² @Rp10.000.000,-, NJOP Bangunan 300 m² @Rp3.000.000,-, NJOPTKP sebesar Rp12.000.000,-. Hitunglah besarnya PBB atas rumah di Jakarta tersebut!
- Rp11.800.000,-
 - Rp11.000.000,-
 - Rp.12.000.000,-
 - Rp11.500.000,-
24. Pada tanggal 30 Desember 2018 Tuan Budi membeli tanah 500 m² seharga Rp500.000.000,- Pada tanggal 5 Januari 2019 dibangun rumah beserta kelengkapannya 300 m² dengan biaya Rp300.000.000,- NJOP tanah termasuk klasifikasi kelompok A-15 sebesar Rp1.032.000,-/m² dan bangunan termasuk klasifikasi kelompok A-2 sebesar Rp968.000,-/m². NJOPTKP di daerah tersebut adalah Rp10.000.000,-. Hitunglah besarnya NJOP dan PBB Tuan Budi tahun 2019!
- Rp504.000,-
 - Rp504.600,-
 - Rp504.000
 - Rp506.000
25. Tarif pajak untuk Objek Pajak Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan adalah sebesar ...
- 40%
 - 20%
 - 10%
 - 5%

26. Tuan Alex mempunyai sebidang tanah dengan panjang 100 m dan lebar 20 m. NJOP tanah tersebut Rp30.000.000,- dan NJOPTKP daerah tersebut Rp12.000.000,- Hitunglah PBB yang harus dibayar oleh Tuan Alex!
- Rp30.000
 - Rp18.000
 - Rp16.000
 - Rp12.000
27. Undang-Undang yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barng Mewah (PPnBM) adalah ...
- UU Nomor 17 Tahun 2000
 - UU Nomor 8 Tahun 1985
 - UU Nomor 42 Tahun 2009
 - UU Nomor 28 Tahun 2007
28. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi ...
- Harga jual, Harga beli, Penggantian, Nilai lain
 - Harga jual, Penggantian, Nilai Import, Nilai Eksport
 - Harga jual, Penggantian, Nilai Import, Nilai Eksport, Nilai lain
 - Nilai jual, Penggantian, Nilai Import, Nilai Eksport, DPP lain
29. Dasar hukum penentuan dasar pengenaan pajak dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 terdapat pada pasal ...
- Pasal 8A
 - Pasal 8 ayat 2
 - Pasal 8
 - Pasal 9
30. Pasal 1 angka 18 UU Nomor 42 Tahun 2009 merumuskan bahwa Harga Jual adalah ...
- Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau tidak seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk pajak
 - Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN

- c. Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau tidak seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP dan JKP, tidak termasuk pajak
 - d. Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP dan JKP, tidak termasuk pajak
31. Pasal 1 angka 19 UU Nomor 42 Tahun 2009 dirumuskan definisi Penggantian yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dalam hal pengusaha melakukan penyerahan adalah ...
- a. Jasa Kena Pajak, Ekspor Jasa Kena Pajak atau Ekspor BKP Tidak Berwujud
 - b. Jasa Kena Pajak, Ekspor Jasa Kena Pajak atau Ekspor BKP
 - c. Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, Ekspor Jasa Kena Pajak atau Ekspor BKP
 - d. Jasa Kena Pajak, Ekspor Jasa Kena Pajak atau Impor BKP Tidak Berwujud
32. Dalam definisi Nilai Impor diperoleh rumus nilai impor sebagai berikut ...
- a. $\text{Nilai Impor} = \text{CIF} + \text{Bea Masuk} + \text{Cukai} + \text{PPnBM}$
 - b. $\text{Nilai Impor} = \text{CIF} + \text{Bea Masuk} + \text{Cukai}$
 - c. $\text{Nilai Impor} = \text{CIF} + \text{Bea Masuk} + \text{Cukai} + \text{PPN Impor}$
 - d. $\text{Nilai Impor} = \text{CIF} + \text{Biaya Masuk} + \text{Cukai}$
33. Besarnya tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah ...
- a. 5 %
 - b. 15 %
 - c. 20 %
 - d. 10 %
34. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 % diterapkan atas ...
- a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan Ekspor Jasa Kena Pajak
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - c. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak
 - d. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak
35. Bendahara melakukan pembayaran atas pembelian ATK sebesar Rp10.000.000,- (harga termasuk PPN) berapakah PPN yang dipungut oleh bendahara ...
- a. Rp100.000,-
 - b. Rp909.090,-

- c. Rp90.909,-
 - d. 110.000,-
36. Atas pengadaan computer dengan nilai pembayaran sebesar Rp9.350.000,- (harga sudah termasuk PPN) dikenakan pemungutan PPN oleh bendahara sebesar
- a. Rp935.000,-
 - b. Rp849.999,-
 - c. Rp425.000,-
 - d. Rp467.500,-
37. Pajak yang bersifat final yaitu ...
- a. PPh Pasal 4 ayat 2
 - b. PPh Pasal 21/26
 - c. PPN & PpnBm
 - d. PBB
38. Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Medan melakukan pembelian tanah di Medan untuk pembangunan kantor baru. Nilai tanah berdasarkan keputusan pejabat pengadaan adalah Rp1.500.000.000,-. Bapak Sinaga sebagai pemilik tanah bersedia menjual dengan harga tersebut. Bapak Sihombing sebagai Bendahara Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Medan membayar sebesar Rp1.500.000.000,- pada tanggal 10 Juli 2012 kepada Pak Sinaga atas pembelian tanah tersebut?
- a. Rp75.000.000,-
 - b. Rp65.000.000,-
 - c. Rp3.000.000,-
 - d. Rp15.000.000,-
39. PT Frineres merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang persewaan gedung dan menyewakan sebagian ruangan kepada PT Haliza dengan harga sewa Rp300.000.000,-/tahun. Biaya *service charge* Rp24.000.000,-/tahun. Atas penghasilan yang diterima oleh PT Frineres wajib dipotong PPh atas penghasilan sewa ruangan gedung oleh PT Haliza yaitu sebesar ...
- a. Rp70.000.000,-
 - b. Rp32.400.000,-
 - c. Rp30.000.000,-

- d. Rp24.000.000.-
40. Adi menyimpan uang di Bank dalam bentuk deposito sebesar Rp100.000.000,- dengan tingkat bunga 12% per tahun. Atas deposito tersebut, Adi menerima bunga setiap bulan sebesar Rp1.000.000,-. Berapa besaran pajak yang harus dibayarkan atas bunga deposito Adi dalam setahun ?
- a. Rp2.300.000,-
 - b. Rp2.400.000,-
 - c. Rp2.000.000,-
 - d. Rp12.000.000,-
41. PT Nusa Indonesia menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas kupon-kupon yang telah dikirimkan oleh para pelanggannya, dengan hadiah senilai Rp100.000.000,-. Dalam penarikan undian tersebut nama Wildan muncul sebagai pemenang hadiah undian. Berapa besaran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang harus dipotong oleh PT Nusa Indonesia ?
- a. Rp20.000.000,-
 - b. Rp12.000.000,-
 - c. Rp25.000.000,-
 - d. Rp24.000.000,-
42. Besarnya tarif PPh Pasal 4 ayat 2 untuk bunga deposito, tabungan, SBI adalah ...
- a. 25 %
 - b. 15 %
 - c. 20 %
 - d. 10 %
43. PT Kontruksi Jaya usaha konstruksi kualifikasi usaha menengah dan besar ditunjuk oleh PT Mandailing, NPWP 03.060.800.1.315.000, alamat Jl. Sulawesi No. 1 Belawan Medan untuk membangun gedung baru dengan nilai kontrak sebesar Rp5.000.000.000,- tidak termasuk PPN. Pada tanggal 2 Mei 2018 membayar sebesar Rp5.000.000.000,-. Pimpinan perusahaan Fazliana, NPWP 07.880.115.1.615. Besar pemotongan PPh Akhirnya sebesar?
- a. Rp150.000.000,-
 - b. Rp200.000.000,-
 - c. Rp100.000.000,-

- d. Rp160.000.000,-
44. Tarif pajak atas bunga obligasi yang diperoleh perusahaan reksadana yaitu sebesar ...
- a. 10%
 - b. 5%
 - c. 15%
 - d. 20%
45. Inspektorat Kabupaten telah melakukan pembangunan gedung dengan perencanaan konstruksi yaitu Burhan. Nilai perencanaan adalah Rp66.000.000. Nilai pembayaran termasuk PPN 10%. Atas pembayaran imbalan tersebut Bendaharawa Inspektorat memotong PPh Final yaitu ..
- a. Rp1.000.000,-
 - b. Rp2.100.000,-
 - c. Rp1.200.000,-
 - d. Rp1.300.000,-
46. Tarif pajak untuk usaha jasa konstruksi tidak memiliki kualifikasi usaha yaitu sebesar ...
- a. 1%
 - b. 3%
 - c. 2%
 - d. 4%
47. Pajak di Indonesia terdiri dari pajak pusat dan daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah yang terdiri dari ...
- a. Pajak Kabupaten dan Kota
 - b. Pajak Provinsi dan Pusat
 - c. Pajak Kecamatan dan Kabupaten
 - d. Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota
48. Berikut ini termasuk pajak daerah, kecuali
- a. Pajak Restoran
 - b. Pajak Hiburan
 - c. Pajak Perhotelan
 - d. Pajak Penghasilan

49. Pak Iwan memiliki 5 motor yang tipe dan tahunnya sama. Diketahui pajak masing-masing motornya pun sama (hal ini supaya memudahkan untuk melihat kenaikan pajaknya) yaitu:

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) : Rp 450.000,-

NJKB (Rp450.000,- x $\frac{2}{3}$ x 100) : Rp30.000.000,-

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan (SWDKLLJ): Rp 50.000,-

Berapakah tarif motor pak Iwan yang pertama (provinsi Sumatera Barat 1,5%)?

- a. Rp450.000,-
- b. Rp300.000,-
- c. Rp350.000,-
- d. Rp500.000,-

50. Berapakah tarif pajak untuk PBB Pedesaan Perkotaan ?

- a. 0,1 %
- b. 0,3 %
- c. 0,5 %
- d. 5 %

51. Berdasarkan data harga yang diambil dari web penyedia pemesanan hotel untuk harga kamar JW Marriot Jakarta untuk tanggal 13/02/2016, diperoleh harga kamar Rp2.011.807, yang merupakan harga diskon dari Rp3.674.858. Lalu berapakah pajak terutang apabila konsumen menginap 2 malam bila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan tarif Pajak Hotel 10%?

- a. Rp402.361,40,-
- b. Rp402.000,-
- c. Rp201.180,70,-
- d. Rp367.485,80,-

52. Sebuah restoran menyediakan makanan dan minuman di tempat, sekaligus melayani pesanan. Berdasarkan laporan Perusahaan, selama satu (1) bulan restoran tersebut memperoleh pendapatan dari konsumen yang makan di restorannya sebesar Rp. 64.000.000,- dan dari pesanan (dus) sebesar Rp. 15.000.000,- Berapakah Pajak restoran yang harus dibayar oleh restoran tersebut?

- a. Rp7.000.000,-

- b. Rp7.900.000,-
- c. Rp1.500.000,-
- d. Rp6.400.000,-

53. Besarnya tarif Pajak Rokok dan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah sebesar ...

- a. 10%
- b. 20%
- c. 0.5%
- d. 30%

54. Harga satu bungkus rokok rokok merek “S” sebesar Rp14.000,- dengan cukai 40% kemudian Pemerintah Daerah (Pemda) memungut Pajak Rokok dengan besaran 10% atas Cukai Rokok. Besarnya pajak rokok yang harus dibayarkan adalah ...

- a. Rp650,-
- b. Rp540,-
- c. Rp600,-
- d. Rp560,-

55. Pak Agus ingin memasang baliho dengan besar 3 x 6 meter di area Kuningan (termasuk jalan protokol kelas A) sebanyak 2 buah selama 7 hari. Besarnya tarif pajak yang dikenakan adalah ...

- a. 30%
- b. 25%
- c. 40%
- d. 15%

KUNCI JABAWAN

1. A. Pajak
2. A. Wajib Pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. D. Bea Materai
4. D. Pajak Penghasilan
5. D. Penyitaan Barang
6. A. Besarnya pajak yang harus dibayar
7. D. Pejabat perwakilan diplomatic
8. C. Gaji
9. D. Penghasilan dari bantuan atau sumbangan dan harta hibahan
10. C. Rp63.000.000,-

Perhitungan :

PTKP (K1)

- WP Pribadi = Rp54.000.000,-
- Menikah = Rp 4.500.000,-
- Anak 1 = Rp 4.500.000,-
- Total PTKP = Rp 63.000.000,-

11. A. Rp180.000,-

Perhitungan :

- Gaji (Rp5.500.000 x 12 bulan) = Rp66.000.000,-
- Biaya jabatan (5% x Rp66.000.000) =(Rp 3.300.000,-)
- Iuran pensiun (Rp50.000 x 12 bulan) =(Rp 600.000,-)
- Penghasilan Neto: = Rp62.100.000,-

PTKP

- WP Pribadi = Rp54.000.000,-
- Menikah = Rp 4.500.000,-
- Total PTKP = Rp58.500.000,-

$$\begin{aligned}
 \text{PKP} &= \text{Penghasilan Neto} - \text{PTKP} \\
 &= \text{Rp}62.100.000,- - \text{Rp}58.500.000,- \\
 &= \text{Rp}3.600.000,-
 \end{aligned}$$

PPh Pasal 21 Terutang

$$5\% \times \text{Rp}3.600.000,- = \text{Rp}180.000,-$$

12. C. Rp15.000,-

Perhitungan :

$$\text{Rp}180.000,- : 12 \text{ bulan} = \text{Rp}15.000,-$$

13. B. Rp6.250.000,-

Perhitungan :

$$5\% \times \text{Rp}50.000.000,- = \text{Rp}2.500.000,-$$

$$15\% \times \text{Rp}25.000.000 = \text{Rp}3.750.000,-$$

$$\text{Total Pajak} = \text{Rp}6.250.000,-$$

14. D. Rp7.500.000,-

Perhitungan :

$$5\% \times 120\% \times \text{Rp}50.000.000,- = \text{Rp}3.000.000,-$$

$$15\% \times 120\% \times \text{Rp}25.000.000 = \text{Rp}4.500.000,-$$

$$\text{Total Pajak} = \text{Rp}7.500.000,-$$

15. B. 15%

16. B. Masjid

17. B. Rp 7.500.000

Perhitungan :

$$\text{NPOP} = \text{Rp}200.000.000,-$$

$$\text{NPOPTKP} = \text{Rp}50.000.000,-$$

$$\begin{aligned}
 \text{BPHTB} &= 5\% \times (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP}) \\
 &= 5\% \times (\text{Rp}200.000.000,- - \text{Rp}50.000.000,-) \\
 &= \text{Rp}7.500.000,-
 \end{aligned}$$

18. A. Rp125.000,-

Perhitungan :

NJOP Tanah (100 x Rp 1.000.000,-) = Rp100.000.000,-

NJOP Bangunan (50 x Rp500.000,-) = Rp 25.000.000,-

Total NJOP = Rp125.000.000,-

NJKP = 20% x Rp125.000.000,-

= Rp25.000.000,-

PBB = 0.5% x Rp25.000.000,-

= Rp125.000,-

19. B. 0,5 %

20. A. 20 %

21. B. 40 %

22. A. Undang-Undang No. 12 Tahun 1994

23. A. Rp11.800.000,-

Perhitungan :

NJOP Bumi (500 m² x Rp10.000.000,-) = Rp5.000.000.000,-

NJOP Bangunan (300 m² x Rp3.000.000,-) = Rp 900.000.000,- +

Total NJOP = Rp5.900.000.000,-

NJKP (40% X Rp5.900.000.000,-) = Rp2.360.000.000,-

PBB yang harus dibayar sebesar

0,5% x Rp2.360.000.000,- = Rp11.800.000,-

24. D. Rp506.000

Perhitungan :

NJOP (500 m² x Rp1.032.000,-) = Rp516.000.000,-

NJKP (20% X (Rp516.000.000,- - Rp10.000.000,-) = Rp101.200.000,-

PBB yang harus dibayar sebesar 0,5% x Rp101.200.000,- = Rp 506.000,-

25. A. 40%

26. B. Rp18.000

Perhitungan :

NJKP (20% X (Rp30.000.000,- Rp12.000.000,-)) Rp3.600.000,-

PBB yang harus dibayar sebesar 0,5% x Rp3.600.000,- => Rp 18.000,-

27. C. UU Nomor 42 Tahun 2009

28. C. Harga jual, Penggantian, Nilai Import, Nilai Eksport, Nilai lain

29. A. Pasal 8A

30. B. Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN

31. A. Jasa Kena Pajak, Ekspor Jasa Kena Pajak atau Ekspor BKP Tidak Berwujud

32. B. Nilai Impor = CIF + Bea Masuk + Cukai

33. D. 10 %

34. A. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak

35. B. Rp909.090,-

Perhitungan :

$$\begin{aligned}\text{DPP} &= 100/110 \times \text{Rp}10.000.000,- \\ &= \text{Rp}9.090.909,-\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PPN} &= 10\% \times \text{Rp}9.090.909,- \\ &= \text{Rp}909.090,-\end{aligned}$$

36. B. Rp849.999,-

Perhitungan :

$$\begin{aligned}\text{DPP} &= 100/110 \times \text{Rp}9.350.000 \\ &= \text{Rp}8.499.999,-\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PPN} &= 10\% \times \text{Rp}8.499.999,- \\ &= \text{Rp}849.999,-\end{aligned}$$

37. A. PPh Pasal 4 ayat 2

38. A. Rp75.000.000,-

Perhitungan :

Harga pengalihan yang menjadi dasar pengenaan pajak atas transaksi pengalihan hak kepada pemerintah adalah dengan pemungutan PPh Pasal 4 Ayat (2) yaitu:

5% x Jumlah Bruto Nilai Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

$$5\% \times \text{Rp}1.500.000.000,- \Rightarrow \text{Rp}75.000.000,-$$

39. B. Rp32.400.000,-

Perhitungan :

10% x Jumlah Bruto Nilai Persewaan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

$$10\% \times (\text{Rp}300.000.000,- + \text{Rp}24.000.000,-) \Rightarrow \text{Rp}32.400.000,-$$

PT Haliza memberikan bukti potong Pasal 4 Ayat (2) kepada PT Frineres.

40. B. Rp2.400.000,-

Perhitungan :

$$\begin{aligned}\text{Bunga Deposito} &= 12\% \times \text{Rp}100.000.000,- \\ &= \text{Rp}12.000.000,-\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Pasal 4 ayat 2} &= 20\% \times \text{Rp}12.000.000,- \\ &= \text{Rp}2.400.000,-\end{aligned}$$

41. C. Rp25.000.000,-

Perhitungan :

$$\begin{aligned}\text{Pasal 4 ayat 2} &= 25\% \times \text{Rp}100.000.000,- \\ &= \text{Rp}25.000.000,-\end{aligned}$$

42. C. 20 %

43. A. Rp150.000.000,-

Perhitungan :

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 4 ayat 2} &= 3\% \times \text{Rp}5.000.000.000,- \\ &= \text{Rp}150.000.000,-\end{aligned}$$

44. B. 5%

45. C. Rp1.200.000,-

Perhitungan :

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak} = \frac{100}{110} \times \text{Rp}66.000.000,- = \text{Rp}60.000.000,-$$

$$\begin{aligned}\text{PPh Final} &= 2\% \times \text{Nilai Kontrak Jasa Konstruksi} \\ &= 2\% \times \text{Rp}60.000.000,- \\ &= \text{Rp } 1.200.000,-\end{aligned}$$

46. D. 4%

47. D. Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota

48. D. Pajak Penghasilan

49. A. Rp450.000,-

Perhitungan :

Motor Pertama:

$$\text{Pajak Kendaraan Bermotor (Rp}30.000.000,- \times 1,5\%) = \text{Rp}450.000,-$$

50. B. 0,3 %

51. A. Rp402.361,40,-

Perhitungan :

Pajak Hotel ($10\% \times 2 \text{ malam} \times \text{Rp}2.011.807,-$) = Rp 402.361,40,-

52. B. Rp7.900.000,-

Perhitungan :

Pajak Restoran = $10\% \times (\text{Rp}64.000.000,- + \text{Rp}15.000.000,-)$
= Rp7.900.000

53. A. 10%

54. D. Rp560,-

Perhitungan :

Nilai Cukai Rokok ($40\% \times \text{Rp}14.000,-$) = Rp5.600

Dan Pemerintah Daerah (Pemda) memungut Pajak Rokok dengan besaran 10% atas Cukai Rokok. Dengan demikian, nilai Pajak Rokok yang harus dibayarkan adalah

$10\% \times \text{Rp}5.600,- = \text{Rp}560,-$

55. B. 25%